



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

RABU, 27 MEI 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Empat Kepala OPD Diperiksa Tipikor

TAIS, BE - Kemarin (28/5), Sat Tipikor Polres Seluma, kembali melakukan klarifikasi terhadap Kepala Dinas Perikanan Emzaili Mpd. Terkait, belum ditindaklanjuti temuan LHP BPK RI, 2017 lalu. Sedangkan, beberapa hari lalu kelima kepala dinas lainnya, juga sudah diperiksa atas temuan BPK tersebut, yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Seluma dengan temuan sebesar Rp 250 juta, Dinas Kesehatan Seluma Rp 150 juta, Dinas Prindakkop Rp 400 juta, Dinas Kelautan Rp 400 juta dan RSUD Tais Rp 200 juta.

ifikasi atas temuan dan berdasarkan bukti yang sudah ada," tegas Kapolres Seluma Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) I Nyoman Mertha Dana Sarjana Ilmu Kepolisian (SIK) melalui Kasat Reskrim Ajun Komisaris Polisi (AKP) Rizka Fadhila didampingi Kanit Tipidkor Inspektur Satu (Iptu) Denny Siregar kepada BE kemarin (28/8).

Disampaikan Denny, dari kelima OPD tersebut baru empat OPD yang sudah dilakukan pemanggilan pertama, yakni Dispendikbud, Disperindagkop, Dinkes, RSUD. Dinkes berdalih sudah selesai menindaklanjuti, hanya saja tidak dapat

melampirkan kelengkapan dokumen kepada penyidik. Sedangkan, Disprindakkop dan Dinkes mereka datang tanpa melampirkan kelengkapan dokumen sehingga belum dapat dimintai klarifikasi. Untuk Dinas Kelautan Seluma, baru melakukan pengembalian Rp 15 juta dari temuan Rp 400 juta.

"Dari keempat OPD yang sudah kita panggil baru RSUD yang sudah 100 persen mengembalikan ke negara dengan melampirkan dokumen yang lengkap. Ketiga OPD lainnya kita panggil ulang yang kita jadwalkan besok, dengan membawa kelengkapan doku-

men karena itu bahan klarifikasi kita," jelas Denny.

Menurutnya, ketiga OPD yang sudah sempat dipanggil tersebut memang keterangan dari mereka sudah ada upaya dicicil. Namun tetap penyidik harus melihat kelengkapan dokumen tersebut. Sekalipun pengembalian tersebut menyicil, jelas harus ada bukti setorkas negara atau kas daerah.

"Kalau dari keterangan Dinkes sudah mencicil, hanya saja belum mencapai setengahnya baru sekitar Rp 20 juta. Namun mereka belum mengajukan kelengkapan dokumennya. Kalau Diknas sama sekali tidak ada dokumen, dalihnya

temuan tersebut pada pejabat lama," jelas Denny.

Ditegaskannya, temuan pada kelima OPD ini LHP BPK RI 2017, sehingga dengan batas ditentukan BPK setelah keluar LHP tersebut OPD yang bersangkutan diberikan waktu selama 60 hari kerja. Sekarang sudah 2019 masih ada empat OPD yang belum selesai.

"Kalau tidak ada itikad baik dari pihak yang bersangkutan dipastikan berpotensi pidana," tegas Denny.

Sementara saat BE mencoba mengkonfirmasi kepala OPD yang menjalani pemeriksaan, mereka enggan memberikan keterangan. (333)